

## **BAB II**

### **TINAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) pencetus teori keagenan menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemilik dan pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Hubungan agensi terjadi satu orang atau lebih memperkerjakan pihak lain untuk memberikan suatu jasa yang kemudian mendelegasikan sebuah wewenang untuk mengambil keputusan kepada pihak agen. Dalam sebuah perusahaan, manajer dituntut untuk menjadi seorang agen yang memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan setiap keuntungan yang diperoleh kepada para pemilik (*principal*), namun pihak manajer juga mempunyai kepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan agen.

Teori agensi terdiri dari tiga asumsi sifat pada diri manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain (*self interest*), (2) manusia memiliki pola pikir yang terbatas mengenai pandangan masa mendatang (*bounded rationaliy*), dan (3) manusia selalu berusaha menghindari setiap risiko yang ada (*risk averse*). Ketiga hal ini menyebabkan setiap informasi yang diterima manusia dari manusia lain sekaku dipertanyakan realibilitasnya (Caesar, 2017).

Dasar utama teori keagenan ini muncul karena adanya ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Tujuan antara pemegang saham dengan pihak manajemen pada dasarnya sulit untuk menyatu karena adanya perbedaan kepentingan yang bisa menyebabkan adanya *asimetry information* (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam kondisi *asimetry information* tersebut, manajer lebih memilih untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dalam menyajikan laporan keuangan kepada pihak investor (Richardson, 1998). Untuk mengantisipasi adanya kecurangan laporan keuangan dibutuhkan *corporate governance* yang baik didalam suatu perusahaan. *Corporate governance* memuat tentang bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa mereka tidak akan melakukan kecurangan terkait dana yang ditanamkan oleh pihak investor, dan berkaitan bagaimana para investor dapat mengontrol pihak manajer (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

## 2. Teori *Fraud Pentagon*

Teori *fraud pentagon* pertama kali dikemukakan oleh Crowe (2011). Teori ini merupakan peluasan dari teori *fraud triangle* yang awalnya telah dikemukakan oleh Cressey (1953), dan teori *fraud diamond* yang juga telah dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dalam teori *fraud pentagon* hanya menambahkan satu elemen yang dapat menimbulkan *fraud* lainnya yaitu arogansi (Herviana, 2017). Alasan teori ini dikembangkan

karena kecurangan jaman sekarang lebih dilengkapi dengan informasi lebih dan akses ke dalam aset perusahaan dibandingkan dengan eranya Cressey (Kurnia dan Anis, 2017).

Berikut ini *Fraud pentagon* divisualisasikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1

*Fraud pentagon* terdiri dari 5 elemen yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, dan *arrogance*.

#### 1) *Pressure*

*Pressure* (tekanan) adalah dorongan orang untuk melakukan *fraud*, dapat mencakup hampir semua hal baik keuangan maupun non keuangan (Widarti, 2015). Tekanan juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang menginginkan seseorang untuk melakukan kejahatan (Annisya, Lindrianasari, dan Asmaranti, 2016). Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

## 2) *Opportunity*

*Opportunity* (peluang) merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki kemungkinan untuk melakukan suatu hal maupun menempati posisi atau jabatan tertentu (Nurbaiti dan Hanafi, 2017). *Fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika calon pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan (Rahmanti dan Daljono, 2013). Peluang dapat terjadi ketika system pengendalian internal dalam suatu perusahaan lemah, kurangnya pengawasan, serta penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi (Rahmanti and Daljono 2013). SAS No.99 mendeskripsikan peluang pada kemungkinan *financial statement fraud* dapat terjadi menjadi tiga kondisi. Kondisi tersebut adalah *ineffective monitoring*, *nature of industry*, dan *organizational structure*.

## 3) *Rationalization*

*Ratinalization* merupakan adanya sikap, karakter, maupun serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan penyelewengan seperti tindakan kecurangan pada pelaporan keuangan, atau pihak-pihak sekitar yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud* (Siddiq dan Hadinata, 2016).

## 4) *Capability*

*Capability* merupakan besarnya daya dan kapasitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan *fraud* di lingkungan perusahaan. Kecurangan terhadap laporan keuangan bisa terjadi ketika terdapat perubahan direksi

yang dianggap dapat memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya (Hanafi, 2017). Dampak dari perubahan direksi dapat menimbulkan *stress period* yang dapat menyebabkan semakin besar peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Perubahan direksi pada kinerja awal akan menjadi tidak maksimal karena membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan perusahaan yang baru (Sihombing dan Rahardjo, 2014).

### 5) *Arrogance*

Crowe (2011) menyatakan bahwa arogansi merupakan sifat superioritas dan hak atau keserakahan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan serta prosedur tidak diterapkan kepadanya. Kesombongan ini muncul dari keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan dan internal kontrol yang ada tidak akan mempengaruhi dirinya sehingga pelaku melakukan tindakan kecurangan tanpa adanya sanksi yang menjeratnya (Achsin dan Cahyaningtyas, 2015).

### 3. *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate in Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur bagaimana hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pemerintah, pihak kreditur, karyawan serta para pemegang saham internal dan eksternal lainnya yang memiliki hak dan kewajiban untuk

mengola dan mengatur sistem perusahaan. *Corporate governance* juga merupakan sistem yang memiliki tujuan untuk mengelola, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan dalam suatu perusahaan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Peran tata kelola perusahaan juga diperlukan untuk dapat mencegah tindakan manajer untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya kecurangan, namun tata kelola yang baik dapat memberikan dampak yang baik untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (Wicaksono, 2015). Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit independen.

#### 4. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil serta merebut uang, harta ataupun hak milik yang dilakukan dengan cara tindakan penipuan ataupun tindakan lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Kecurangan dalam pandangan audit dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan mengubah maupun menghapus jumlah angka atau nominal yang dilakukan secara sengaja dalam penyajian laporan keuangan perusahaan untuk dapat mengelabui para penggunanya (Elder, 2011).

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh *Financial Stability* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

*Financial Stability* adalah suatu keadaan maupun gambaran yang menunjukkan keadaan stabil dalam kondisi keuangan perusahaan. Kondisi perusahaan yang tidak stabil dapat menjadi tekanan pada pihak manajemen karena dianggap dapat menghambat aliran investasi bagi perusahaan tersebut.

Menurut SAS No.99 juga menjelaskan bahwa seorang manajer akan menghadapi kondisi maupun tekanan untuk melakukan tindakan *financial statement fraud* ketika stabilitas keuangan perusahaan mengancam kondisi industri, ekonomi, serta kondisi entitas yang beroperasi. Karena aset dalam perusahaan dapat menarik pihak investor dengan menunjukkan kondisi perusahaan yang baik. Oleh karena itu stabilitas keuangan diukur menggunakan rasio perubahan total aset.

Dalam penelitian Skousen et.al. (2009) menunjukkan bahwa semakin besar rasio perubahan total asset pada suatu perusahaan, maka kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam suatu perusahaan semakin tinggi. Hal ini didukung dalam penelitian yang Tiffani dan Marfiah (2015) dan Sihombing dan Raharjo (2014) yang menyebutkan bahwa *financial stability* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia

dan Anis (2017) yang menyatakan bahwa *financial stability* memiliki pengaruh yang negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Financial Stability* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **2. Pengaruh *Financial Target* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

*Financial Target* merupakan suatu tekanan berlebih dari *principal* yang digunakan untuk mencapai suatu target keuangan sesuai harapan dan keinginan *principal* (Widarti, 2015). Manipulasi laba merupakan suatu cara yang akan dilakukan untuk dapat memenuhi tolak ukur bagi para analis atas laba entitas (Widarti, 2015). *Financial targets* entitas yang terlalu tinggi akan berdampak pada manipulasi laba yang akan semakin rentan untuk dilakukan.

Semakin besar ROA yang ditargetkan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin rentan manajemen untuk melakukan manipulasi laba dalam bentuk kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini timbul karena adanya tekanan kepada pihak manajer untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skousen et al. (2009) dan Indarti, Siregar, dan Lubis (2014) menjelaskan bahwa *financial targets* memiliki pengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dan Tiffani dan Marfuah (2015) yang menjelaskan bahwa *financial statement fraud* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Financial target* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

### **3. Pengaruh *Personal Financial Need* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

*Personal financial need* menurut SAS No.99 merupakan suatu kondisi dimana keuangan para eksekutif perusahaan yang mempengaruhi kondisi keuangan pihak perusahaan. Dalam SAS No.99 juga menyebutkan bahwa manajer dan para eksekutif perusahaan akan mengalami kondisi keuangan pribadi yang terancam oleh kinerja keuangan perusahaan. Sehingga para eksekutif yang memiliki wewenang atas kepemilikan saham dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam melakukan pengungkapan kinerja keuangan perusahaan.

Semakin besar presentase kepemilikan saham oleh orang dalam, maka semakin besar potensi untuk melakukan kecurangan kecurangan laporan keuangan. Dan sebaliknya jika kepemilikan saham oleh orang dalam perusahaan yang rendah menyebabkan manajer tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiffani dan Marfuah (2015), Kusumawardhani (2013) dan Maghfiroh dan Syafnita (2015) yang menjelaskan bahwa *personal financial need* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian diatas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Skousen et al. (2009) yang menjelaskan bahwa *personal financial need* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : *Personal financial need* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

#### **4. Pengaruh *Ineffective Monitoring* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

*Ineffective Monitoring* adalah suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa perusahaan tidak memiliki suatu unit pengawasan yang efektif untuk dapat memantau kinerja suatu perusahaan. Menurut Maharani (2012) bahwa suatu entitas yang memiliki suatu standar efektivitas Komite Audit yang tinggi, maka akan membuat perusahaan tersebut terhindar dari

*financial statement fraud*. Sebaliknya jika suatu entitas memiliki suatu standar efektivitas Komite Audit yang rendah, maka akan membuat perusahaan tersebut sangat rentan terhadap *financial statement fraud*, karena Komite Audit dianggap belum dapat melakukan pengawasan yang optimal.

Semakin tinggi *ineffective monitoring* yang dilakukan dalam suatu perusahaan maka akan menyebabkan resiko kecurangan yang tinggi dalam pengungkapan laporan keuangan. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan Aprilia (2017) dan Maghfiroh dan Syafnita (2015) menjelaskan bahwa *ineffective monitoring* memiliki pengaruh yang positif terhadap *financial statement fraud*.

Namun, penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Putra (2017) dan Sari (2016) yang menjelaskan bahwa *ineffective monitoring* tidak memiliki pengaruh terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

$H_4$  : *Ineffective Monitoring* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **5. Pengaruh *Change in Auditor* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Auditor merupakan seorang pengawas penting dalam perusahaan yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan. Berbagai informasi keuangan maupun kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh pihak auditor. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayuni (2016) menyatakan bahwa banyak perusahaan melakukan pergantian auditor untuk menaati regulasi yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa masa pemberian jasa audit dibatasi paling lama hanya lima tahun buku secara berturut-turut.

Semakin tinggi atau semakin seringnya dilakukan pergantian auditor dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula potensi untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Hal ini turut mendukung penelitian yang dilakukan Kurniawati (2012) yang menjelaskan bahwa *change in auditors* memiliki pengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurnia dan Anis (2017), Tessa dan Harto (2016), dan Aprilia (2017) yang menjelaskan bahwa *change in auditors* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>5</sub> : *Change in Auditor* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **6. Pengaruh *Change in Director* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Wolfe dan Hermanson (2014) mengatakan bahwa salah satu faktor kecurangan dapat terjadi apabila dilakukan oleh seseorang yang memiliki pemahaman untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Pelaku kecurangan sangat membutuhkan kemampuan dalam dirinya untuk melakukan tindakan kecurangan, sebelum itu ia juga harus memahami kondisi dan keadaan perusahaan. Namun, menurut Rahmayuni (2016) perubahan direksi bisa saja menjadi suatu tindakan atau upaya untuk dapat memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan cara melakukan perekrutan direksi baru maupun perubahan pada susunan direksi lama. Sementara disisi lain, pergantian direksi dapat menjadi upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Semakin sering dilakukannya pergantian direksi baru kemungkinan terjadinya kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan menjadi lebih tinggi. Saat pergantian direksi baru dianggap membutuhkan waktu adaptasi yang mengakibatkan kinerja awal yang tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Kusumaningrum (2017) yang menjelaskan bahwa *change in director* memiliki pengaruh yang positif terhadap *financial statement fraud*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Surya dan Zarefar (2018), Kurnia dan Anis (2017) dan Aprilia (2017) yang menjelaskan bahwa *change in director* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka, Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

$H_6$  : *Change in Director* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **7. Pengaruh *Political Connection* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Perusahaan yang memiliki hubungan politik (*political connection*) yang kuat cenderung memiliki beberapa keuntungan seperti lebih mudah mendapatkan akses pinjaman dari bank, lebih mudah mendapatkan kontrak dari pemerintah dan ketika sedang mengalami *financial distress* akan lebih mudah di *bail out* oleh pemerintah (Chaney, 2011). Bisa dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih diuntungkan ketika sedang mengalami kesulitan atau kebutuhan modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wu et. al. (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan hubungan politik memiliki tingkat kecurangan yang rendah karena kemudahan akan sumber biaya yang didapat memungkinkan perusahaan untuk menghindari melakukan kecurangan laporan keuangan.

Sebaliknya menurut penelitian hasil Simon et. al. (2015) yang menyatakan untuk mengukur arogansi dengan melihat adanya CEO dalam sebuah perusahaan yang merupakan seorang politisi. Pada penelitian ini, hubungan politik tidak tertuju hanya pada CEO tetapi anggota dewan komisaris juga termasuk didalamnya. Dengan peran ganda seorang CEO atau dewan komisaris tersebut dapat membantu kelancaran bisnis karena banyak koneksi. Namun, hal ini akan menumbuhkan sifat angkuh atau sombong dalam diri mereka yang mengakibatkan menghalalkan segala macam cara untuk menutupi kecurangannya dan memanfaatkan koneksinya yang luas. CEO dan dewan komisaris akan berpikir bahwa kelancaran bisnis perusahaan karena perannya. Oleh karena itu, arogansi dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Chaney et. al. (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan terdorong untuk melakukan kecurangan laporan keuangan karena faktor koneksi politik. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngan (2013) menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang ditemukan adanya faktor koneksi politik perusahaan memungkinkan potensi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

$H_7$  : *Political connection* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **8. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang sekaligus sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen dalam menselaraskan kepentingannya. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih optimal dan mendorong pihak manajer memilih langkah terbaik dalam mengambil keputusan, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi tindakan manajer yang melakukan kecurangan laporan keuangan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Penelitian Skousen et al. (2009) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan dapat dilihat dari kepemilikan manajerial orang dalam.

Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh manajerial, maka tindakan kecurangan pun semakin kecil. Hal ini karena manajer juga memiliki peran sebagai pemegang saham, oleh karena itu manajer lebih cenderung membuat keputusan terbaik sehingga akan memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Marietza (2017) mendukung pernyataan tersebut bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>8</sub> : Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## **9. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh suatu perusahaan atau Lembaga lain. Kepemilikan institusional juga dapat memonitor kinerja manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional dianggap dapat memotivasi peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan adanya monitoring tersebut tentu akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Roberts dan Yuan (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepemilikan institusional yang luas dapat memberikan dampak yang baik untuk melakukan pengawasan dan monitoring yang lebih ketat terhadap kinerja pihak manajemen sehingga peluang untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan semakin kecil.

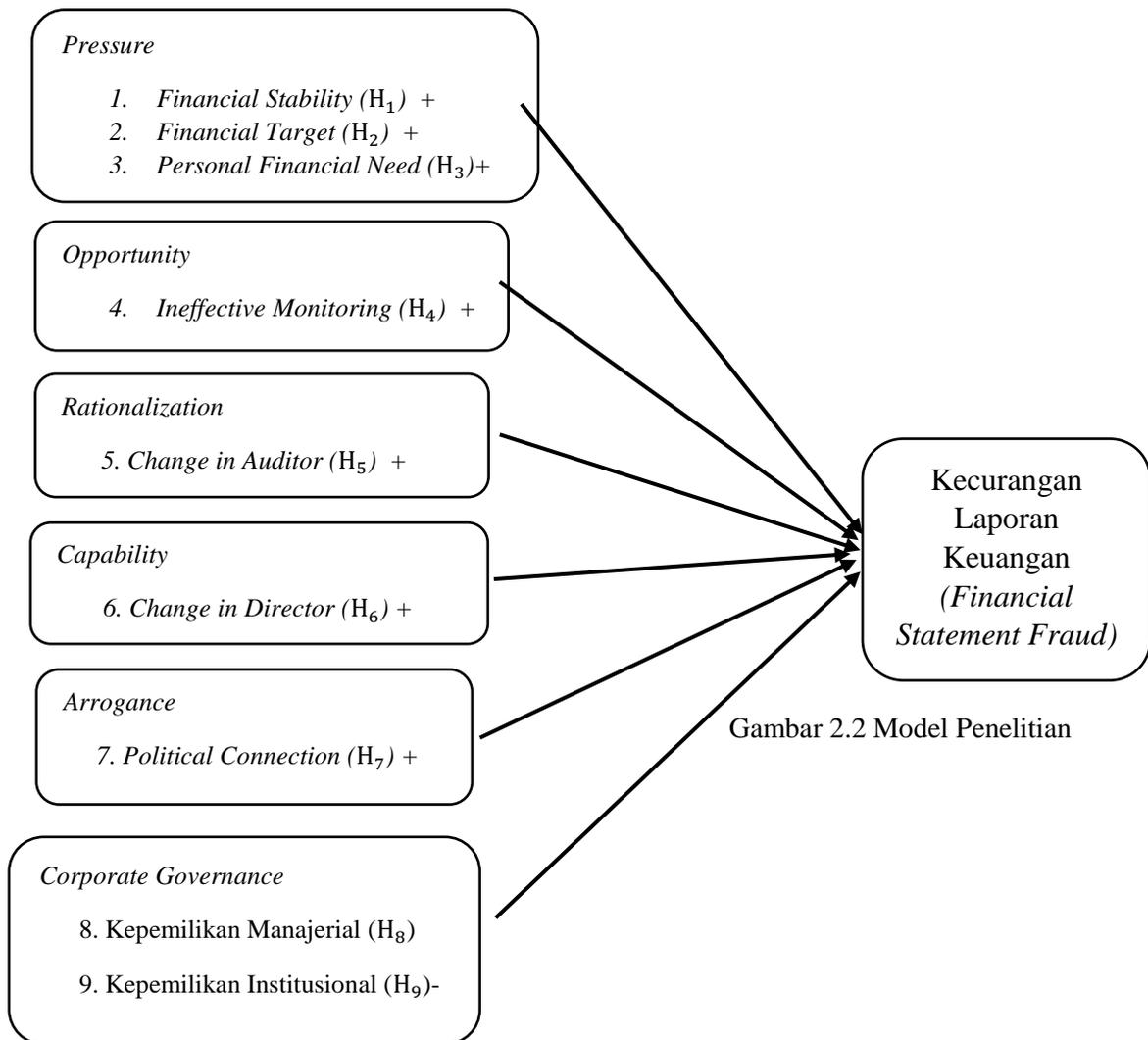
Hasil penelitian yang dilakukan Wang et al. (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin besar peran kepemilikan institusional sehingga terjadinya kecurangan semakin kecil. Selain penelitian Wang et al. (2010), penelitian di Indonesia dilakukan oleh Anggara (2014) yang juga menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *fraud* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (kecuali industri keuangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin

tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi probabilitas terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan penurunan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>9</sub> : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

### C. Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan posisi serta garis hubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Model penelitian yang digunakan adalah:



Gambar 2.2 Model Penelitian